

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan atau fraud adalah isu serius yang dapat merusak integritas dan kelangsungan hidup suatu organisasi. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan didorong oleh kemajuan teknologi, potensi terjadinya kecurangan semakin besar. Tindakan fraud bisa muncul dalam berbagai bentuk, termasuk manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian, penggelapan atau penyalahgunaan aset perusahaan, serta tindakan korupsi yang melibatkan pejabat atau karyawan. Dampak dari kecurangan ini sangat luas, tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga merusak reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Selain itu, perusahaan yang terlibat dalam kecurangan dapat kehilangan kepercayaan dari mitra bisnis, investor, dan bahkan pelanggan, yang berpotensi menyebabkan kerugian lebih lanjut dalam jangka panjang. Dalam beberapa kasus, kecurangan ini juga dapat berujung pada tindakan hukum yang merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, kecurangan merupakan ancaman besar bagi stabilitas keuangan perusahaan di seluruh dunia, mengakibatkan kerugian yang signifikan. ACFE (2020) mendefinisikan kecurangan sebagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh individu dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi melalui manipulasi atau penyalahgunaan aset dan kekayaan perusahaan. Berdasarkan laporan "*Report to the*

Nations", diperkirakan perusahaan di seluruh dunia kehilangan sekitar 5% dari pendapatannya setiap tahunnya akibat tindakan kecurangan. Di Indonesia, masalah ini juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan laporan terbaru ACFE yang berjudul "*Asia-Pacific Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*", Indonesia berada di peringkat keempat negara dengan jumlah kasus kecurangan terbanyak pada tahun 2022. Di Indonesia, bentuk kecurangan yang paling sering terjadi adalah korupsi, yang mencakup 64% dari total kasus yang dilaporkan. Selain itu, penyalahgunaan aktiva dan kekayaan perusahaan serta negara menyumbang 28,9% dari kasus, sementara fraud laporan keuangan tercatat sebanyak 6,7%..

Selain menimbulkan dampak finansial yang merugikan, perilaku kecurangan ini berpotensi merusak reputasi dan citra publik organisasi yang telah susah payah dibangun dengan jerih payah, yang telah dibangun dengan waktu dan upaya yang besar. Kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya bisa terganggu, yang akhirnya mengarah pada penurunan nilai saham dan hilangnya peluang bisnis. Selain itu, kasus kecurangan yang terungkap dapat berujung pada tindakan hukum yang dapat merugikan perusahaan secara lebih lanjut, termasuk denda besar, gugatan hukum, atau bahkan hukuman pidana bagi pihak-pihak yang terlibat. Menurut survei yang dilakukan oleh Deloitte pada tahun 2021, sekitar 87% dari responden menyatakan bahwa kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk mengurangi risiko kecurangan, perusahaan perlu menerapkan kontrol internal yang ketat, melakukan audit secara teratur oleh pihak independen, dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, penting juga untuk membangun budaya

perusahaan yang berintegritas tinggi serta mendorong transparansi dalam pelaporan keuangan.

Penerapan pengendalian internal yang efektif adalah langkah strategis yang penting dalam mencegah kecurangan di perusahaan. Menurut Mulyadi (2017) menjelaskan bahwa pengendalian internal mencakup sistem terpadu, kerangka kerja organisasi, dan proses yang dirancang untuk menjaga aset perusahaan, memastikan keakuratan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. Suatu organisasi dapat mengidentifikasi dan mengurangi risiko kecurangan, seperti manipulasi atau pencurian keuangan, dan meminimalkan penyalahgunaan sumber daya melalui penerapan sistem pengendalian internal yang kuat. Selain itu, pengendalian internal yang kuat memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan, memberikan perlindungan terhadap reputasi perusahaan, dan memperkuat kepercayaan *stakeholder* terhadap integritas perusahaan.

Selain itu, transparansi juga sangat penting dalam organisasi. Menurut Mahmudi (2018) menggambarkan transparansi sebagai kesiapan organisasi untuk membuat informasi tentang pengelolaan sumber daya mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Dengan transparansi, organisasi menunjukkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan dengan memastikan informasi yang relevan tersedia bagi semua pihak yang terlibat. Transparansi memastikan integritas, ketepatan, dan kelengkapan data keuangan yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk pemberi pinjaman, pemegang saham, dan otoritas pemerintah. Dengan memastikan transparansi yang tinggi dalam pelaporan

keuangan, perusahaan dapat memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas perusahaan.

. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, yang biasa disebut Telkom, adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan infrastruktur telekomunikasi serta menyediakan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Pemerintah Indonesia memegang kepemilikan mayoritas Telkom, mengendalikan sekitar 52,09% saham perusahaan, sedangkan sisanya dimiliki publik. Saham Telkom tercatat dan diperdagangkan secara aktif di Bursa Efek Indonesia dengan simbol ticker "TLKM" dan juga tersedia di Bursa Efek New York dengan kode "TLK." Sebagai salah satu penyedia telekomunikasi terkemuka di negara ini, Telkom terus memperluas operasinya untuk mengakomodasi kebutuhan komunikasi penduduk Indonesia yang terus meningkat. sejalan dengan visi jangka panjangnya untuk berkembang menjadi perusahaan telekomunikasi yang sepenuhnya digital, TelkomGroup telah menempatkan penekanan kuat pada peningkatan kepuasan pelanggan, menjadikannya salah satu prioritas strategis utamanya. Transformasi yang sedang berlangsung ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kemampuan beradaptasi Telkom dalam menanggapi tantangan berkelanjutan dan perubahan cepat yang terjadi dalam industri telekomunikasi. Dengan pendekatan yang lebih mengutamakan kebutuhan pelanggan, Telkom berharap dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan terus mempertahankan posisi terdepan di sektor telekomunikasi Indonesia.

Sembari tetap berada dalam lingkup sektor statistik dan telekomunikasi, TelkomGroup terus memperluas dan menyesuaikan kegiatan bisnisnya sebagai respons terhadap kemajuan teknologi, inovasi digital, dan arus informasi yang terus berlanjut. Tantangan yang dihadapi oleh TelkomGroup dalam perjalanan transformasinya tidak hanya terbatas pada aspek teknologi dan operasional, tetapi juga melibatkan masalah pengendalian internal dan transparansi. Salah satu yang menggambarkan hal ini adalah adanya kecurangan (fraud) yang terjadi di Cabang Telkom Akses Region III Jawa Barat.

Hingga akhir September 2023, pihak berwenang telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait penyidikan tindak pidana korupsi. Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp3,9 miliar akibat kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan tiga karyawan PT Telkom Akses yang bertugas di kantor regional Jawa Barat. Menurut Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejaksaan Negeri Bandung, Taufik Effendi, ketiga tersangka dalam kasus ini adalah Manager Keuangan, Asisten Manager Finance/Site Manager, dan Staf Finance.

Modus operandi yang digunakan oleh para tersangka adalah dengan melakukan laporan fiktif terkait anggaran belanja alat dan prasarana kerja. Para tersangka melakukan manipulasi terhadap nota belanja dengan menggunakan tanda tangan palsu. Dokumen palsu yang dimanipulasi kemudian diunggah ke dalam aplikasi FISTA menggunakan User ID Staf Finance. Kasus ini mengungkapkan kegagalan dalam pengendalian internal dan otoritas di PT. Telkom Akses Jawa Barat, di mana para tersangka mampu mengakses dan memanipulasi data keuangan dengan menggunakan wewenang yang mereka miliki sebagai pegawai perusahaan.

Diperlukan langkah-langkah untuk memperketat pengendalian, di mana setiap pegawai hanya memiliki akses sesuai tanggung jawabnya.

Temuan ini juga menyoroti kekurangan dalam sistem pengawasan dan pemeriksaan internal yang efektif di PT. Telkom Akses Jawa Barat, serta perlu adanya peningkatan pengawasan dan pemeriksaan internal. Sistem pengawasan internal yang efektif dapat membantu mendeteksi potensi kecurangan atau pelanggaran sebelum menjadi kasus yang lebih besar. Perlu adanya langkah-langkah untuk memperkuat tim internal audit dan mendorong budaya pengawasan yang ketat di seluruh departemen perusahaan. Selain itu, manipulasi dokumen merupakan indikasi jelas dari kelemahan dalam pengendalian dokumen dan rekonsiliasi di PT Telkom Akses Regional Jabar. Perusahaan harus menerapkan prosedur yang ketat untuk mengelola dokumen keuangan, mulai dari pengumpulan hingga penyimpanan dan penggunaannya. Rekonsiliasi berkala antara data yang tercatat dengan transaksi yang sebenarnya harus dilakukan secara rutin untuk memastikan keabsahan dan keakuratan informasi keuangan.

Menyoroti dari segi transparansi, kasus ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan untuk mencegah kecurangan. Perusahaan perlu meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan keuangan dan proses pengelolaan anggaran. Dengan demikian, pihak eksternal dan internal dapat mengakses informasi yang relevan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana perusahaan. Praktik kecurangan seperti manipulasi dokumen atau laporan fiktif dapat terdeteksi lebih awal dan dicegah.

Pengelolaan anggaran yang terbuka menjadi kunci dalam mencegah terjadinya kecurangan. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap pengeluaran dan alokasi anggaran dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini akan membantu menjaga integritas dan akuntabilitas perusahaan dalam penggunaan dana. Selain itu, penerapan sistem audit internal yang ketat dan rutin serta pelatihan bagi karyawan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas juga menjadi langkah penting dalam mencegah kecurangan. Dengan meningkatkan transparansi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan mencegah berbagai bentuk kecurangan.

Hal lain yang juga wajib menjadi sorotan adalah keterbukaan dalam pengambilan keputusan, di mana perusahaan perlu mendorong keterbukaan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan keuangan. Dengan melibatkan pihak ketiga dan menyediakan akses terbuka terhadap informasi mengenai keuangan dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan perusahaan dan dapat mengurangi risiko terjadinya praktik kecurangan.

Dalam penelitian ini, penulis menyoroti kecurangan dari sisi kasus korupsi di PT Telkom Akses Regional Jawa Barat. Kasus ini menekankan urgensi penerapan pengendalian internal yang kuat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Modus operandi yang digunakan oleh para tersangka mengungkap kelemahan dalam sistem pengendalian akses, pengawasan internal yang kurang efektif, serta kekurangan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kelemahan-kelemahan ini memberikan celah bagi individu-individu tertentu untuk

mengeksplotasi sistem demi keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan perusahaan dan *stakeholder*-nya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dari sudut pandang pengendalian internal dan transparansi, serta mengevaluasi strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat sistem pengendalian dan meningkatkan akuntabilitas dalam manajemen perusahaan.

Dengan demikian, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang dapat diimplementasikan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang dan memperkuat integritas serta kredibilitas perusahaan. Berdasarkan fenomena yang telah diungkapkan sebelumnya, penulis tertarik menganalisis pengaruh pengendalian internal dan transparansi terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan dalam penelitian yang berjudul “PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)(Studi Kasus PT. Telkom Akses Region Jawa Barat)”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terdapat kerugian sebesar Rp3,9 miliar yang diakibatkan oleh kegagalan sistem pengendalian internal. Kasus korupsi di PT Telkom Akses Regional Jawa Barat menyoroti kelemahan dalam pengendalian akses dan pengawasan internal yang tidak efektif. Para tersangka mampu melakukan manipulasi

terhadap dokumen keuangan dengan menggunakan wewenang yang mereka miliki sebagai pegawai perusahaan.

2. Temuan menunjukkan bahwa alokasi anggaran tidak dilakukan dengan keterbukaan yang memadai. Kasus ini mengungkapkan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan proses pengelolaan anggaran di PT Telkom Akses Regional Jawa Barat. Manipulasi dokumen dan laporan fiktif menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
2. Seberapa besar Transparansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
3. Seberapa besar Pengendalian internal dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian internal dan transparansi terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Jenjang Pendidikan Program Strata Satu (S1), Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi di Universitas Sangga Buana Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Maksud penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh Pengendalian Internal terhadap pencegahan kecurangan
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap pencegahan kecurangan
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh Pengendalian Internal dan Transparansi secara bersama-sama terhadap pencegahan kecurangan

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi dan menambah kajian ilmu akuntansi serta memberikan wawasan baru dalam memahami dinamika bisnis dan praktik akuntansi yang terus berkembang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. Telkom Akses Region Jawa Barat mengenai pengendalian internal dan transparansi sehingga dapat mencegah Kecurangan pada laporan Keuangan.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) memperkenalkan *Internal Control – Integrated Framework* pada tahun 1994, yang mendefinisikan pengendalian internal sebagai serangkaian prosedur yang diterapkan oleh manajemen perusahaan untuk memastikan pencapaian tujuan dengan cara yang efisien. *Framework* ini menyarankan adanya kebijakan dan prosedur yang dikembangkan untuk memastikan organisasi beroperasi secara efektif dan mengelola risiko dengan baik. Dalam *framework* ini,

COSO mengidentifikasi lima komponen utama yang harus diterapkan untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian internal dapat tercapai, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Pengendalian internal itu sendiri adalah suatu sistem kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, memastikan keakuratan laporan keuangan, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Mahmudi (2018), tujuan utama pengendalian internal adalah untuk menghindari penyalahgunaan sumber daya dan untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Mulyadi (2017) juga mengemukakan bahwa pengendalian internal melibatkan koordinasi struktur organisasi dan prosedur yang dilakukan untuk menjaga aset perusahaan, memverifikasi keandalan data akuntansi, dan mendorong efisiensi operasional, sekaligus memastikan bahwa kebijakan manajerial dijalankan dengan baik oleh seluruh pihak terkait.

Menurut (Mulyadi, 2017), pengendalian internal bertujuan menjaga kekayaan organisasi dari ancaman pencurian, penyalahgunaan, atau kerusakan, baik fisik maupun non-fisik seperti piutang dagang, serta memastikan ketelitian data akuntansi untuk keputusan manajemen. Selain itu, pengendalian internal juga mendorong efisiensi operasional perusahaan dan kepatuhan karyawan terhadap kebijakan manajemen. Dengan sistem informasi akuntansi yang tepat, pengendalian internal dapat melindungi kekayaan perusahaan dan mencegah kerugian. Penting bagi perusahaan untuk memiliki pengendalian internal yang kuat guna melindungi

aset dari penyalahgunaan, memastikan keakuratan informasi akuntansi, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan manajemen. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi operasionalnya, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan mengurangi risiko kerugian yang dapat timbul akibat kelemahan dalam pengendalian internal.

GCG merupakan singkatan dari "*Good Corporate Governance*" atau "Tata Kelola Perusahaan yang Baik" dalam bahasa Indonesia. GCG adalah praktik-praktik, kebijakan, dan prosedur yang diterapkan dalam sebuah perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut dijalankan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut (Agoes, 2019) Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem yang mengatur hubungan antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Ini juga dikenal sebagai proses transparan dalam menetapkan tujuan perusahaan, mencapainya, dan mengevaluasi kinerjanya.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam (Agoes, 2019) menjelaskan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai suatu sistem yang melibatkan peran berbagai pihak dalam organisasi, termasuk pemegang saham, direksi, dan manajemen perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pencapaian sasaran perusahaan serta melakukan pengawasan yang efektif terhadap kinerja organisasi tersebut. Meskipun kerangka hukum dan sistem yang ada sudah dirancang dengan baik, faktor yang paling menentukan dalam penerapan GCG adalah kualitas dan kesadaran moral serta spiritual dari para pelaku bisnis itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh *National Committee on Governance*

(2006) dalam (Agoes, 2019), ada lima prinsip dasar dalam penerapan GCG yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Independensi, dan Kesenjangan.

Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip ini mengacu pada keterbukaan suatu organisasi dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada semua pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, investor, dan masyarakat luas (Mahmudi, 2018). Menurut (Ritonga & Syahrir, 2016) konsep transparansi tidak hanya berfokus pada ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh publik, tetapi juga mencakup aspek penyajian yang tepat waktu dari informasi tersebut. Artinya, transparansi mencakup lebih dari sekadar memberikan akses kepada informasi, tetapi juga menekankan pentingnya penyajian yang tepat waktu agar publik dapat memperoleh informasi yang relevan secara efektif. Dengan demikian, transparansi menjadi kunci dalam memastikan bahwa informasi yang diberikan memiliki nilai yang signifikan dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan.

Transparansi menjadi penting bagi sebuah perusahaan karena merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan transparansi yang baik, perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan memberikan akses yang luas terhadap informasi yang relevan tentang pengelolaan sumber daya dan aktivitas perusahaan kepada publik, termasuk karyawan, investor, pelanggan, dan pihak lain yang terlibat. Ini menciptakan lingkungan di mana keputusan dapat diambil berdasarkan pemahaman

yang jelas dan transparan tentang situasi dan kondisi perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan. Selain itu, transparansi juga dapat membantu mencegah konflik kepentingan, meminimalkan risiko hukum, dan meningkatkan efisiensi dalam operasi perusahaan dengan memungkinkan pemangku kepentingan untuk secara aktif terlibat dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan demikian, transparansi bukan hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), praktik kecurangan adalah masalah yang merugikan banyak perusahaan di berbagai negara. ACFE (2020) mendefinisikan kecurangan sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh individu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak sah, yang sering kali melibatkan tindakan penggelapan atau penyalahgunaan aset perusahaan. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Wells (2018), yang menjelaskan bahwa kecurangan dalam laporan keuangan terjadi ketika kondisi keuangan perusahaan dipresentasikan secara salah, melalui manipulasi angka atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu para pengguna laporan tersebut.

Banyak ahli telah memperkenalkan beragam perspektif teoritis dalam upaya untuk menafsirkan penyebab mendasar dari perilaku kecurangan. Di antara semuanya, *Fraud Triangle* tetap menjadi salah satu model yang paling dikenal luas dan sering digunakan dalam ranah praktik akuntansi publik. *Fraud Triangle* berfungsi sebagai alat konseptual yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman

tentang elemen-elemen mendasar yang berkontribusi terhadap pelanggaran keuangan atau praktik perusahaan yang tidak etis. Model ini pertama kali dikembangkan oleh kriminolog Donald Cressey pada tahun 1953. Menurut SAS 99 (AU 316), *Fraud Triangle* mengidentifikasi tiga kondisi utama yang mendasari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset, yang meliputi tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Skema *Fraud Triangle* terdiri dari tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan juga pembenaran (*rationalization*).



Sumber: SAS 99 (AU 316)

Gambar 1-1 Fraud Triangle

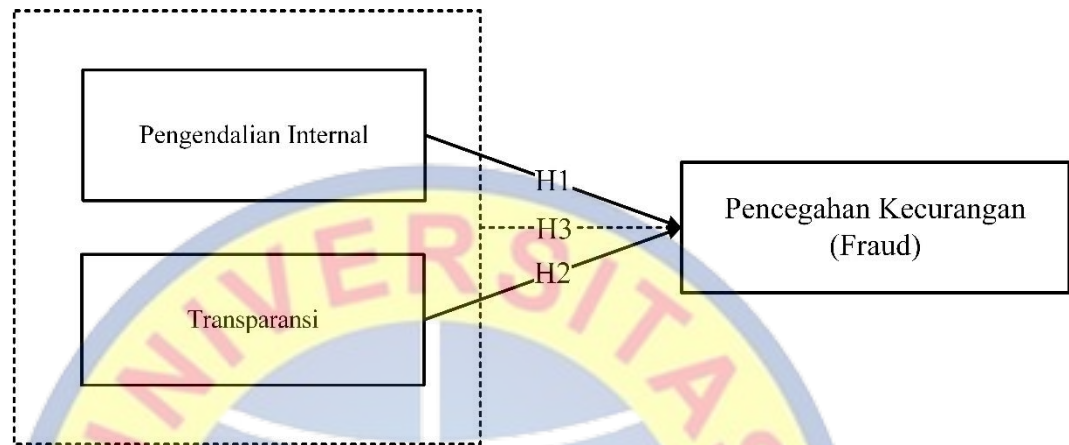
1. Tekanan atau *Pressure* adalah faktor pendorong yang dapat memaksa seseorang untuk melakukan kecurangan. Contoh tekanan ini meliputi hutang yang menumpuk atau kebutuhan finansial yang mendesak. Meskipun kebutuhan finansial sering menjadi alasan utama, dalam beberapa kasus, tindakan

kecurangan juga dipicu oleh dorongan keserakahan atau ambisi pribadi yang berlebihan.

2. Kesempatan atau *Opportunity* adalah kondisi yang memungkinkan kecurangan untuk terjadi, yang biasanya disebabkan oleh kelemahan dalam pengendalian internal, kurangnya pengawasan, atau penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu. Di antara ketiga elemen dalam *Fraud Triangle*, kesempatan adalah faktor yang paling dapat dikendalikan dan diminimalisir, terutama melalui penerapan prosedur yang ketat, sistem pengendalian yang efektif, dan upaya deteksi dini terhadap potensi kecurangan.
3. Pembenaan atau rasionalisasi merupakan elemen yang sangat penting dalam proses terjadinya kecurangan, karena pelaku sering kali mencari cara untuk membenarkan tindakannya. Rasionalisasi ini adalah salah satu komponen dari fraud triangle yang sering kali sulit untuk diukur secara objektif. Dalam konteks ini, pelaku kecurangan cenderung menggunakan alasan tertentu untuk mengurangi rasa bersalah atau ketidaknyamanan yang mereka rasakan terhadap perbuatannya, meskipun tindakan tersebut melanggar norma atau aturan yang berlaku.

Hal diatas menegaskan menegaskan bahwa praktik kecurangan merupakan ancaman serius bagi integritas dan kredibilitas informasi keuangan perusahaan, yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan serta merusak reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pencegahan dan deteksi

kecurangan merupakan prioritas utama bagi perusahaan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan operasionalnya.



Gambar 1-2 Kerangka Pemikiran

1. Hubungan Pengendalian Internal dan Pencegahan Kecurangan

Penerapan pengendalian internal yang efektif oleh perusahaan memiliki dampak besar pada biaya dan pendapatan. Dengan sistem yang memadai, perusahaan dapat mengelola biaya dengan efisien, memastikan penggunaan anggaran optimal, dan menghindari pemborosan. Selain itu, pengendalian internal yang baik juga membantu dalam memperoleh dan mempertahankan pendapatan dengan efektif, dengan memantau strategi penjualan, siklus pendapatan, dan risiko kehilangan pendapatan.

Sebaliknya, pengendalian internal yang kurang memadai dapat menyebabkan biaya yang tidak efisien dan pendapatan yang menurun. Kurangnya pengawasan terhadap pengeluaran dapat menyebabkan penggelembungan dana dan praktik kecurangan, yang pada gilirannya

mengancam kesehatan finansial perusahaan dan meningkatkan risiko kebangkrutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siska Herlita (2021) mengenai pengaruh pengendalian internal piutang terhadap pencegahan kecurangan di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah terjadinya kecurangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kontribusi pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan mencapai 55%. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yunita Marasabessy (2016) juga mengemukakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dalam pencegahan kecurangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang baik dapat secara efektif meningkatkan upaya pencegahan terhadap tindakan kecurangan dalam perusahaan..

Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal mereka. Dengan memperkuat pengendalian internal, perusahaan dapat mengurangi risiko kecurangan dan memaksimalkan kinerja keuangan mereka. Ini termasuk peningkatan pemantauan terhadap transaksi keuangan, penerapan kebijakan yang jelas dan ketat, serta pelatihan karyawan untuk memahami pentingnya kepatuhan terhadap prosedur internal. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan

jangka panjang dan memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Hubungan Transparansi dan Pencegahan Kecurangan

Transparansi dalam pengelolaan perusahaan memainkan peran krusial dalam mengurangi kesempatan untuk tindakan kecurangan. Ketika tingkat transparansi mencukupi, peluang untuk kecurangan menurun drastis. Dalam lingkungan yang transparan, setiap transaksi dan kegiatan memiliki jejak yang jelas dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang, sehingga meminimalkan celah untuk tindakan curang.

Dampak dari tingkat transparansi yang memadai adalah peningkatan pendapatan dan penyebaran biaya yang lebih merata. Dengan memungkinkan visibilitas yang lebih besar terhadap semua aspek operasional dan keuangan perusahaan, manajemen dapat mengidentifikasi secara lebih efektif pola-pola yang tidak wajar atau indikasi kecurangan. Hal ini berkontribusi untuk memperkuat kepercayaan bersama di antara para pemangku kepentingan—seperti pemegang saham dan konsumen—yang, pada gilirannya, dapat mendorong pertumbuhan yang stabil dalam pendapatan perusahaan dari waktu ke waktu.

Sebaliknya, ketika tingkat transparansi rendah, risiko kecurangan menjadi lebih tinggi. Kurangnya visibilitas terhadap aktivitas internal perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk tindakan kecurangan. Ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan karena

adanya manipulasi atau penggelapan dana yang tidak terdeteksi. Selain itu, biaya perusahaan mungkin menjadi tidak merata karena potensi pemborosan yang tidak terawasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wildayanti et al. (2023) melakukan penelitian yang mengungkap bahwa peningkatan tingkat transparansi dan penerapan sistem pengendalian internal yang kuat berkontribusi signifikan dalam meminimalkan kejadian kecurangan laporan keuangan di kalangan pelaku usaha yang berlokasi di Kecamatan Ampa Tete. Berdasarkan tanggapan survei dari 39 partisipan, penelitian menunjukkan bahwa transparansi memegang peranan penting dan positif dalam mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Temuan ini menyiratkan bahwa informasi yang dapat diakses secara terbuka dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan curang.

Oleh karena itu, meningkatkan transparansi dalam operasi perusahaan adalah kunci untuk mengurangi risiko kecurangan dan memastikan keseimbangan yang sehat antara pendapatan dan biaya. Ini melibatkan kebijakan dan prosedur yang jelas, pelaporan yang terbuka, dan pengawasan yang ketat terhadap semua aktivitas perusahaan. Akibatnya, organisasi dapat mengembangkan lingkungan kerja yang lebih aman dan lebih produktif, yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan keuangan dan strategis yang lebih luas.

1.6.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pemaparan Hubungan antar variabel bebas (Pengendalian internal dan transparansi) dan variabel terikat (Pencegahan Kecurangan), maka penulis menarik Hipotesis yaitu

- H₁: Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan.
- H₂: Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan.
- H₃: Pengendalian Internal dan Transparansi Secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan.

